

**ANALISIS KONTRIBUSI, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI
PPJ, BPHTB DAN PBB-P2 TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN BANYUMAS PERIODE 2013-2016**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :
RIA DWIASTUTI
NIM 1423203117

IAIN PURWOKERTO

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pajak.....	12
1. Pengertian Pajak Secara Umum	12
2. Fungsi Pajak	14
3. Asas Pemungutan Pajak	15
4. Asas Pengenaan Pajak.....	16
5. Sistem Pemungutan Pajak	17
B. Pajak Daerah	18
1. Pengertian Pajak Daerah	18
2. Jenis Pajak Daerah	19
C. Pendapatan Asli Daerah	19
D. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	21

E. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	22
F. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	25
G. Kontribusi.....	28
H. Efektivitas	29
I. Efisiensi.....	31
J. Kajian Pustaka	31
K. Landasan Teologis	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	37
B. Tempat dan Waktu	37
C. Populasi dan Sampel Penelitian	37
D. Pengumpulan Data Penelitian	38
1. Subjek dan Objek Penelitian	38
2. Sumber Data.....	38
3. Teknik Penumpulan Data.....	38
4. Teknik Analisis Data.....	39

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas.....	45
B. Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis	48
1. Kontribusi Jenis Pajak Daerah di Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016.....	48
a. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016.....	48
b. Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016.....	51
c. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016.....	54

2. Efektivitas Jenis Pajak Daerah di Kabupaten Banyumas	
Periode Tahun 2013-2016.....	57
a. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di	
Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016.....	57
b. Efektivitas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan	
Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Banyumas	
Periode Tahun 2013-2016.....	60
c. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan	
Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Banyumas	
Periode Tahun 2013-2016.....	64
3. Efisiensi Jenis Pajak Daerah di Kabupaten Banyumas	
Periode Tahun 2013-2016.....	68
a. Efisiensi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di	
Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2016.....	68
b. Efisiensi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan	
Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Banyumas	
Periode Tahun 2013-2016.....	69
c. Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan	
Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Banyumas Periode	
Tahun 2013-2016.....	71
C. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten	
Banyumas.....	72
D. Kendala yang Dihadapi Oleh Pemerintah Daerah Dalam	
Melaksanakan Pemungutan PPJ,BPHTB dan PBB P2.....	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia hierarki pemerintah terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah setidaknya terbagi lagi atas pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten/Kota. Sesuai dengan perkembangan yang ada, yang saat ini lebih populer dengan reformasi, Pemerintah di daerah menuntut adanya otonomi yang lebih luas namun bertanggungjawab. Sejalan dengan itulah istilah otonomi daerah sudah pula bermasyarakat dengan luas, yang saat ini dikenal dengan era otonomi daerah yang tertampung dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (pembaharuan dari UU No. 22 Tahun 1999). Salah satu konsekuensi lebih lanjut dari undang-undang tersebut adalah perlunya diatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.¹

Sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 22 Tahun 1999, bahwa otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan daerah dalam menggali

¹ Abdul Halim, *Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik-Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008), hlm.3.

²Alexander Abem *Perencanaan Daerah Partisipatif*, (Solo: Amanah, 2002), hlm. 1-2.

pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.³

Desentralisasi pada dasarnya adalah penetapan mekanisme pengelolaan kebijaksanaan dengan kewenangan yang lebih besar diberikan kepada daerah agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan lebih efektif dan efisien. Desentralisasi tidak mengakibatkan makin besarnya kesenjangan antardaerah, tetapi justru harus mampu mendekatkan taraf kemajuan daerah satu dengan daerah lainnya.⁴

Dengan upaya desentralisasi dan pengembangan otonomi daerah selanjutnya adalah akan semakin banyaknya dana-dana sektoral yang akan dikonversi menjadi dana bantuan daerah, terutama ke daerah tingkat II, secara berangsur-angsur menjadi dana-dana yang bersifat bantuan umum atau bantuan umum sektoral yang penggunaannya diserahkan kepada daerah secara sepenuhnya, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi serta potensi yang tersedia. Dengan bantuan tersebut, diharapkan daerah-daerah dengan pendapatan asli daerah rendah akan dapat semakin meningkatkan tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁵

Namun meningkatnya perkembangan pemerintahan daerah di Indonesia masih belum diiringi dengan perkembangan kinerja yang memadai. Semakin meningkatnya jumlah pemerintah daerah di Indonesia tentunya akan membutuhkan dukungan pembiayaan pemerintah pusat yang semakin besar, apabila arah pergerakan Pemda-Pemda tersebut belum mampu menghasilkan pendapatan asli daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang memadai untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah yang justru semakin terus meningkat dari waktu ke waktu.

³ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 51-52.

⁴ Ginanjar Kartasmita, *Pembangunan untuk Rakyat*, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1996), hlm.342.

⁵ Ginanjar Kartasmita, *Pembangunan untuk Rakyat...*,352.

Oleh karena itu perolehan Pendapatan Asli Daerah, retribusi, maupun pendapatan-pendapatan lainnya serta dana perimbangan yang bervariasi antar daerah-daerah di Indonesia tersebut, diperlukan manajemen pemanfaatan dana yang mampu digunakan semaksimal mungkin bagi kemakmuran masyarakat yang sebesar-besarnya melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang diluncurkan pemerintah daerah tersebut.⁶

Sama halnya dengan daerah lain di Indonesia, Wilayah Kabupaten Banyumas pada periode 2010-2013 menduduki peringkat tertinggi di Jawa Tengah terkait dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah Kabupaten Semarang. Kabupaten Banyumas merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Kabupaten Banyumas diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuannya. Potensi sumber ekonomi di Kota Banyumas apabila terus dikembangkan dan ditingkatkan, nantinya mampu meningkatkan citra daerah, sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan pajak daerah karena pajak daerah sangat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kab. Banyumas
Periode Tahun 2013-2016

No	Tahun	Target Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah
1	2013	Rp 269.886.824.923	Rp 308.349.434.319
2	2014	Rp 377.914.849.329	Rp 435.597.688.642
3	2015	Rp 451.559.187.568	Rp 502.281.349.460
4	2016	Rp 495.482.076.976	Rp 541.418.386.912

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Banyumas

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa perolehan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas selama empat tahun terakhir yakni tahun 2013-

⁶ Susanto, dkk., *Reinvensi Pembangunan Ekonomi Daerah*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2010), hlm. 220-221.

2016 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu mencapai target yang telah dibuat pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dan selalu mengalami peningkatan. Perolehan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2013 Rp 308.349.434.319, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp 435.597.688.642 dan di tahun 2015 sebesar Rp 502.281.349.460 dan peningkatan selanjutnya ditahun 2016 yaitu sebesar 2016 Rp 541.418.386.912. Dari tabel diatas berarti Kabupaten Banyumas selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

Tabel 1.2
Realisasi Pajak Daerah Kab. Banyumas Periode Tahun 2013-2016
(dalam ribuan rupiah)

No	Pajak	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Hotel	Rp 3.814.325	Rp 4.772.100	Rp 6.025.201	Rp 6.864.568
2	Restoran	Rp 1.881.900	Rp 2.251.463	Rp 3.558.799	Rp 7.430.280
3	Hiburan	Rp 1.380.340	Rp 1.542.861	Rp 1.637.881	Rp 1.933.326
4	Reklame	Rp 2.354.935	Rp 2.026.432	Rp 2.721.150	Rp 2.680.641
5	PPJ	Rp 32.793.199	Rp37.640.166	Rp44.401.192	Rp 49.331.136
6	Gol. C	Rp 1.539.360	Rp 2.186.339	Rp 1.620.026	Rp 3.556.248
7	Parkir	Rp 219.603	Rp 308.167	Rp 532.861	Rp 823.658
8	Air Tanah	Rp 120.728	Rp 300.854	Rp 488.023	Rp 630.190
9	BPHTB	Rp 20.939.992	Rp 22.164.139	Rp 26.947.589	Rp 30.226.007
10	PBB-P2	Rp 46.245.764	Rp 36.996.804	Rp 41.745.645	Rp 43.880.094
Jumlah		Rp111.290.146	Rp110.189.325	Rp129.678.367	Rp147.356.148

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Banyumas

Dari tabel 1.2 dijelaskan bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Banyumas periode empat tahun terakhir yakni tahun 2013 sampai 2016 tidak selalu mengalami peningkatan. Penurunan penerimaan pajak daerah yang terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 1% atau turun menjadi Rp 110.189.325.000 dari yang sebelumnya pada tahun 2013 Rp 111.290.146.000 , kemudian pajak daerah mengalami peningkatan pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 129.678.367.000 dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp 147.356.148.000.

Penurunan penerimaan pendapatan pajak daerah yang terjadi pada tahun 2014 karena penurunan penerimaan pendapatan pajak reklame dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Penurunan pendapatan pajak reklame pada TA 2014 merupakan dampak penerapan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan reklame. Di dalam Peraturan Daerah tersebut, terdapat perubahan ketentuan mengenai bentuk, ukuran dan tempat pemasangan yang mengakibatkan banyak penyelenggara reklame yang tidak dapat mengajukan perpanjangan ijin reklame. Di samping itu, banyak ijin pemasangan reklame baru yang tidak lolos karena tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan daerah tersebut. Selain itu, peraturan daerah yang baru tersebut tidak mengatur mengenai papan reklame yang tidak berbentuk persegi (bulat, lengkung, logo perusahaan) yang mengakibatkan tidak dapat dipungutnya papan reklame dengan bentuk persegi tersebut. Selain itu juga adanya penurunan tarif pada pajak bumi dan bangunan yang awalnya 0,25% menjadi 0,2%.⁷

Pada penerimaan pajak daerah ada 10 komponen yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan (golongan C), pajak parkir, pajak air tanah, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Tabel di atas menunjukkan bahwa komponen pajak daerah yang perolehannya paling besar dan kontribusinya besar terhadap pendapatan asli daerah yaitu pada pajak penerangan jalan, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Pada tabel 1.2 penerimaan pajak daerah dari pajak penerangan jalan selama periode tahun 2013-2016 selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan rata-rata perolehannya sebesar Rp 41.041.423.300 dan rata-rata kontribusi terhadap PAD sebesar 9,29%. Rata-rata perolehan pajak bea perolehan hak atas tanah yaitu sebesar Rp 25.069.431.800 dan rata-rata

⁷Wawancara dengan Bapak Maryono, S.E. selaku Kepala Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan 28 Maret 2018.

kontribusi terhadap PAD yaitu sebesar 5,56%. Untuk perolehan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan rata-ratanya sebesar Rp. 42.217.076.800 dan rata-rata kontribusi terhadap PAD sebesar 9,97%.

Berdasarkan latarbelakang yang diuraikan di atas, perlu diketahui seberapa besar efektivitas dan kontribusi dari PPJ, BPHTB dan PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Banyumas selama periode 2013-2016. Dengan menghitung kontribusi, efektivitas dan efisiensinya hal ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerah Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat kedalam penelitian yang berjudul **“ANALISIS KONTRIBUSI, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PPJ, BPHTB DAN PBB P2 TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BANYUMAS PERIODE 2013-2016”**.

B. Definisi Operasional

1. Kontribusi

Kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata serapan dari sumbangan. Menurut Dany H, Yandianto dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa kontribusi sebagai bentuk iuran uang atau dana pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya. Jadi bila disimpulkan berdasarkan kedua pengertian di atas bahwa kontribusi adalah bentuk bantuan nyata berupa uang terhadap suatu kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan.⁸

2. Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin di raih oleh sebuah organisasi. Untuk memperoleh teori efektivitas penelitian dapat menggunakan konsep-konsep dalam teori manajemen dan organisasi

⁸ Pengertiandefinisi.com/konsep-dan-pengertian-kontribusi/, diakses pada tanggal 4 November 2017 pukul 13:48 WIB.

khususnya yang berkaitan dengan teori efektivitas. Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi. Karena keduanya memiliki arti yang berbeda walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan.⁹

3. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Berdasarkan Undang-Undang Tahun 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah/kota. Bangunan adalah konstruksi

⁹Jovanly Atteng.dkk, 2016, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado Tahun 2011-2015", ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/13591, diakses pada tanggal 4 November 2017, pukul 13:00 WIB.

teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/laut.¹⁰

6. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.¹¹

C. Rumusan Masalah

1. Seberapa besar kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016?
2. Seberapa besar kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016?
3. Seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016?
4. Seberapa besar tingkat efektivitas dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016?
5. Seberapa besar tingkat efektivitas dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) pada pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016?

¹⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

¹¹ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 51-52.

6. Seberapa besar tingkat efektivitas dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016?
7. Seberapa besar tingkat efisiensi dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016?
8. Seberapa besar tingkat efisiensi dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) pada pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016?
9. Seberapa besar tingkat efisiensi dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016?
- b. Mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016?
- c. Mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016?
- d. Mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016?

- e. Mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) pada pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016?
- f. Mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016?
- g. Mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016?
- h. Mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) pada pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016?
- i. Mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016?

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dan tolak ukur di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada umumnya untuk pengembangan keilmuan, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan bagi peneliti, dan dari penelitian ini peneliti berharap bisa memperkaya pengetahuan tentang kontribusi dan efektivitas dan efisiensi PPJ, BPHTB, PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas.

2) Bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka menjalankan usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PPJ, BPHTB, PBB P2.

3) Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan bahan bacaan atau referensi tentang PPJ, BPHTB, PBB P2.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran dan memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka akan disajikan sistematika penulisan yang merupakan garis besar dari skripsi ini. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini akan diuraikan mengenai kajian putaka dan beberapa teori yang dapat digunakan sebagai kerangka pemikiran teori atau landasan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, pengumpulan data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil yang diperoleh dalam penelitian dan pembahasannya yang meliputi deskripsi objek penelitian, analisis data, serta pembahasan atas hasil pengelolaan data.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas pada tahun 2013-2016 dalam kategori sangat kurang yaitu 9,3%
2. Tingkat kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas pada tahun 2013-2016 dalam kategori sangat kurang yaitu 5,7%
3. Tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas pada tahun 2013-2016 dalam kategori sangat kurang yaitu 9,98%
4. Tingkat Efektivitas Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas pada tahun 2013-2016 dalam kategori sangat efektif yaitu rata-rata 117,98%
5. Tingkat Efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas pada tahun 2013-2016 dalam kategori sangat efektif yaitu rata-rata 128,75%
6. Tingkat Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas pada tahun 2013-2016 dalam kategori sangat efektif yaitu rata-rata 110,46%
7. Tingkat Efisiensi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas pada tahun 2013-2016 dalam kategori sangat efisien yaitu rata-rata 5%
8. Tingkat Efisiensi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas pada tahun 2013-2016 dalam kategori sangat efisien yaitu rata-rata 5%

9. Tingkat Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas pada tahun 2013-2016 dalam kategori sangat efisien yaitu rata-rata 5%

Namun secara sistem administrasi belum sepenuhnya dikatakan efektif seperti belum dikenakan pajak pada penggunaan tenaga listrik non PLN, NJOP yang belum sesuai dengan harga pasar dan masih ada yang telat membayar pajak.

Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan 3 komponen pajak daerah di Kabupaten Banyumas yang memiliki kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pajak daerah yang lain.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu melakukan penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak supaya Wajib Pajak sadar akan kewajibannya terhadap negara.
2. Dapat mencegah dan memberikan sanksi yang tegas, serta hukuman yang adil sesuai ketentuan sehingga akan menimbulkan kepatuhan pada masyarakat Wajib Pajak dalam membayar pajak agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
3. Sebaiknya untuk meningkatkan kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Bea Perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), Pemerintah Kabupaten Banyumas diharapkan dapat mengoptimalkan potensi penerimaan Pajak tersebut sehingga penerimaan Pajak Daerah tidak naik turun tetapi terus meningkat tiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo: Amanah. 2002.
- Atteng, Jovanly.dkk. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado Tahun 2011-2015*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. 2016, Vol. 16, No. 04.
- Dokumen Laporan Keuangan Kab. Banyumas
- Fauziah, Isfatul. *Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang*. Jurnal Perpajakan. 2014, Vol. 3, No. 1.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PTRajaGrafindo Persada. 2007.
- Halim, Abdul. *Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik- Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2008.
- Ilyas, Wirawan B. dan Rudi Suhartono. *Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2017.
- Kartasmita, Ginanjar. *Pembangunan untuk Rakyat*. Jakarta: Pustaka Cidesindo. 1996.
- Lamia, Alfian A., dkk. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. 2015, Vol. 15, No. 05.
- <https://www.google.co.id/amp/s/m.viva.co.id/amp/berita/bisnis/885212-ini-penyebab-masyarakat-malas-bayar-pajak>.
- Kasiram, Mohammad. *Metodologi Penelitian Kualitatif-kuantitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Press. 2010.
- Pengertiandefinisi.com/konsep-dan-pengertian-kontribusi
- Mardiasmo. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi. 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2012.
- Octaviana S, Devy. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah*

Tahun 2008-2012, Skripsi. Semarang: Universitas Dian Nuswantoro Semarang, 2014.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011

Prasetyono, Dwi Sunar. *Buku Pintar Pajak*. Yogyakarta: Laksana. 2012.

Puspitasari, Elfayang Rizky Ayu. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blora Tahun 2009-2013*, Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro, 2014.

Rahayu, Siti Kurnia. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains. 2017.

Ratih, Christina. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran (Studi Kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta 2004-2008)*, Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2010.

Riady, Indra. *Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut*, Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.

Sitegar, Syofian. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara. 2017.

Sugiono. *Metodologi Penelitian dan Pengembangan Research and Development*. Bandung: Alfabeta. 2016.

_____. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2015.

Supramono dan Theresi Woro Damayanti. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi, 2015.

Susanto, dkk.,. *Reinvensi Pembangunan Ekonomi Daerah*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama. 2010.

Syah, Irwan. *Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Kota Semarang)*, Skripsi.Semarang: Universitas Diponegoro, 2014.

Terj. Ibnu Katsier 2 Edisi revisi. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset. 2005.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: STAIN PRESS. 2014.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Haryani. *Analisis Kontribusi, Elastisitas, Efisiensi dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bireuen*. Jurnal Ilmu Ekonomi ISSN. 2013, Vol. 1.

Wawancara dengan Bapak Maryono, S.E. selaku Kepala Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan (PAP), 8 Mei 2018.

Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.

